

KETIKA KEBIJAKAN ORDE LAMA MEMASUKI DOMAIN PENDIDIKAN: PENYIAPAN DAN KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DI INDONESIA

Umasih

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Jakarta
umasih_sejarah@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article reveals how the educational policy in Indonesia during The Old Order. The domination of government (Soekarno) as expressed in the domination theory by Antonio Gramsci which a politic is a commander and it can dominate whole Indonesia society life including an educational aspect. Furthermore, Soekarno as an individual manivesto has given a space for PKI because of their closeness. When the Minister, Prijono, issued a decision concerning about Pancawardhana Educational System, The Institution of National Education which is affiliated by PKI giving a formulation of Pancacinta. An education in the political manifesto obliges teachers enter into a practical politics life, teachers have to be revolutionary . It means that the learning practice is given toward students through indoctrination. No less than 2000 teachers in the East java and the Cental Java finally became PKI members, then about 580 teachers of elementary school from the West Java. Even PKI has succeeded to divide the organization of teacher's membership into The Cental Vak PGRI and non Vak Central PGRI.

Keywords : The Old Order, The Pacawardhana Educational System, the performance of elementary teachers.

ABSTRAK

Artikel ini mengungkapkan bagaimana kebijakan pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama. Dominasi pemerintah (Soekarno) seperti diungkapkan dalam teori dominasi oleh ntonio Gramsci di mana politik adalah panglima dan dapat mendominasi segala kehidupan masyarakat Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno sebagai manivesto perseorangan juga telah memberi ruang gerak pada PKI karena kedekatan hubungannya dengan Presiden Soekarno. Ketika Menteri Prijono mengeluarkan keputusan tentang Sistem Pendidikan Pancawardhana, Lembaga Pendidikan Nasional yang berafiliasi dengan PKI memberi rumusan tentang Pancacinta. Pendidikan dalam alam manipol mengharuskan guru terjun dalam kehidupan politik praktis, guru harus revolusioner yang dalam praktik pembelajaran dilakukan kepada peserta didik melalui indoktrinasi. Tidak kurang dari 2000 guru Jawa Timur dan Jawa Tengah akhirnya menjadi anggota PKI, demikian pula kira-kira 580 orang guru sekolah dasar dari Jawa Barat. Bahkan PKI telah berhasil memecah organisasi keanggotaan guru menjadi PGRI Vak Sentral dan PGRI non Vak Sentral.

Kata Kunci : Orde Lama, Sistem Pendidikan Pancawardhana, Kinerja Guru SD.

PENDAHULUAN

Reformasi dan kebijakan otonomi pendidikan nampaknya masih sebatas wacana. Perlakuan pemerintah terhadap guru baik guru negeri maupun swasta kurang memberikan ruang kepada guru

agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Sebut saja, dalam pembuatan dokumen perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP yang diedarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), seringkali disampaikan bukan sebagai model untuk contoh,

melainkan dokumen itulah yang “disalin ulang” sebagai perangkat pembelajaran milik guru. Guru dari sekolah manapun akhirnya membuat perangkat pembelajaran yang seragam tanpa memperhatikan kondisi sekolah, siswanya serta kemampuan dirinya. Guru juga selalu dinilai rendah kompetensinya, tetapi tidak ada program yang sistematis untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan dan penataran-penataran dalam jumlah terbatas memang dilakukan, tetapi tindak lanjut dari hasil kegiatan itu pun tanpa pembinaan. Jika itu yang terjadi tidak ada bedanya dengan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu lebih merupakan proses *brainwashing* (cuci otak saja) agar guru tidak kritis dan tidak memiliki sikap politik yang berbeda dengan penguasa. Dengan demikian, guru profesional seperti yang diamanatkan Undang-Undang Guru dan Dosen pun sulit terjadi.

Sehubungan dengan tugas-tugas profesional guru, ia harus dapat menunjukkan tanggung jawab profesionalnya dan secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau program pengembangan profesional serta memiliki komitmen untuk belajar terus menerus. Ia juga harus berusaha untuk melibatkan diri dalam proses refleksi secara kritis terhadap praktik-praktik peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu upaya-upaya penyegaran proses pembelajaran harus memperhatikan profesionalitas guru.

Australian Institute for Teaching and School Leadership (2011) melansir *National Professional Standards for Teachers* yang memiliki lima cakupan dimensi standar. Di dalamnya mencakup tanggung jawab profesional, yaitu; isi (materi) pembelajaran, praktik pembelajaran, penilaian dan pelaporan proses belajar siswa, serta hubungan dengan sekolah atau komunitas yang lebih luas. Jika kelima

hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka luaran atau lulusan yang berkaitan dengan mutu pendidikan pun akan baik, demikian pula sebaliknya.

Penelitian tentang bagaimana mutu pendidikan Indonesia yang terkait dengan kompetensi guru secara parsial telah banyak dilakukan baik untuk kepentingan akademik (skripsi, tesis, disertasi) maupun upaya yang dilakukan pemerintah misalnya melalui uji kompetensi guru (UKG). Akan tetapi, sudahkah ada tindak lanjut sehubungan dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut? Pemetaan tentang kualifikasi guru baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah telah diupayakan solusinya melalui pendidikan lanjut, agar guru-guru Indonesia memiliki jenjang kualifikasi minimal S1 atau D4. Dengan demikian jumlah guru yang kualifikasinya kurang memenuhi syarat dapat teratasi.

Bagaimana mutu pendidikan Indonesia yang terkait dengan kualifikasi (kepemilikan ijazah) guru telah dilakukan studi sejak tahun 1960 pada masa pemerintahan Orde Lama oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rendahnya mutu pendidikan terkait dengan kualifikasi guru. Guru sekolah dasar yang *non qualified* pada awal tahun 1960 sebesar 11 persen. Bahkan pada awal Pelita I jumlah guru yang *non qualified* meningkat menjadi 15 persen, *semi qualified* 70 persen dan *qualified* 15 persen (*Suara Guru*, 1973; *Hasil Kongres PGRI*, 1973). Artinya, jumlah guru SD yang memenuhi persyaratan kualifikasi hanya sebagian kecil saja dari guru yang ada saat itu, yaitu minimal berijazah Sekolah Guru A.

Studi yang dilakukan oleh PGRI tersebut ada hubungannya dengan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah dasar antara tahun 1953 sampai dengan 1960 dari 1,7 juta siswa menjadi

2,5 juta, meskipun 60 persen dari jumlah itu keluar sebelum tamat (Ricklefs, 2007:473). Lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah dan tinggi bermunculan terutama di Pulau Jawa. Angka melek huruf, juga meningkat dari 7,4 persen pada tahun 1930 menjadi 46,7 persen pada tahun 1960 dari jumlah anak yang berusia sepuluh tahun ke atas dan mayoritas (76 persen) laki-laki.

Lembaga pendidikan tinggi untuk guru pun disiapkan makin lebih baik. Lembaga pendidikan tinggi hingga tingkat sarjana yaitu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang didirikan pada tanggal 18 dan 20 Oktober tahun 1954 di Malang dan Bandung, menyusul kemudian PTPG di Batusangkar (Sumatera Barat) dan Tondano (Manado). Pendirian keempat PTPG tersebut meskipun yang di Batusangkar dan Tondano tidak berjalan lancar, namun dalam sejarah pendidikan Indonesia sudah memasuki fase baru, di mana bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya peningkatan mutu guru melalui pnyiapan pendidikannya (Suradi, 1986; Syamsudin, 1993).

Selain itu ketika angka kebutuhan guru belum terpenuhi, didirikanlah Fakultas-fakultas Keguruan di lingkungan universitas generasi awal seperti UI, UNPAD, UNAIR, dan UGM. Untuk guru-guru sekolah dasar yang semula disiapkan oleh sekolah guru B (SGB), sejak tahun 1958 ditingkatkan menjadi SGA dan pada pertengahan tahun 1960 diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Akan tetapi SPG swasta kemudian berdiri di mana-mana, karena animo masyarakat akan kependidikan makin meningkat sejalan makin kondusifnya situasi keamanan negara, yang mengakibatkan jumlah lulusan tidak dapat diangkat lagi menjadi guru SD. Permasalahan ini baru teratasi ketika tahun 1973 pemerintah mendirikan sekolah dasar inpres dalam

jumlah banyak (Yasin, 1987; Depdikbud, 1990).

Langkah strategis yang diambil pemerintah Soekarno untuk mengurai kebuntuan politik saat itu adalah mengeluarkan dekrit yang terkenal dengan nama Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Salah satu isi dekrit adalah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Dekrit itu kemudian disusul dengan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin dan beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Presiden menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan (Ricklefs, 2007:527)

Dalam bidang pendidikan, mau tak mau harus menyelenggarakan pendidikan yang Manipolis. Pendidikan Manipolis bertujuan melahirkan tenaga-tenaga ahli yang patriotik, demokratis dan manipolis. Sistem pendidikan berwatak Manipolis harus menyiapkan manusia baru kader pembangunan yang ahli, patriot, demokrat serta bercita-cita sosialisme (Waluyo, 1964; Poesponegoro & Notosusanto [ed], 2008).

Untuk memberikan dasar dalam pendidikan nasional yang sesuai dengan Manipol-Usdek Menteri PP dan K, Prof. Dr. Prijono, merumuskan langkah-langkah jangka pendek dengan mengeluarkan instruksi Menteri Muda PP dan K Nomor 1/1959 tentang Sapta Usaha Tama dan instruksi Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Pancawardhana. 'Panca' artinya lima dan wardhana artinya kebajikan, jadi lima kebajikan yaitu: (1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, keagamaan; (2) Perkembangan kecerdasan; (3) Perkembangan

emosional-artistik atau rasa keharmonisan dan keindahan lahir dan batin; (4) perkembangan keprigelan dan kerajinan tangan; (5) perkembangan jasmani. Sistem pendidikan Pancawardhana pada hakikatnya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi, serta bercorak nasionalistik yang memenuhi tuntutan Revolusi Indonesia yang sedang berjalan (Depdikbud, 1985).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentu saja peran guru sangat besar. Guru-guru seperti apakah yang mampu mewujudkan manusia-manusia generasi muda untuk melanjutkan revolusi? Bagaimana pemerintah mempersiapkan guru-guru yang manipolis sehingga ia mampu bekerja seperti yang diamanatkan Menteri Prijono tersebut.

Penelitian tentang sejarah pendidikan terlebih masa Orde Lama belum banyak dilakukan apalagi dibukukan, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat bangsa Indonesia tentang praksis penyelenggaraan pendidikan masa itu. Selama era reformasi ini, buku-buku yang ditulis maupun wacana, opini yang dikembangkan lebih pada menggugat bagaimana pendidikan pada masa Orde Baru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada periode Orde Lama, suatu masa yang serba samar-samar pernah "hampir merah" dengan makin kuatnya dominasi komunisme di Indonesia.

Penelitian ini berusaha ingin mengungkap bagaimana pemerintah Orde Lama mempersiapkan guru-guru sekolah dasar agar menjadi guru yang manipolis sejati, yang memiliki semangat baja untuk memenangkan revolusi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana kinerja guru sekolah dasar dalam alam manipolis.

METODE PENELITIAN

Teori yang digunakan untuk menganalisis fakta dalam penelitian ini adalah Teori Hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci. Gramsci merumuskan konsepnya yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik dalam terminologinya "momen", di mana filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifesto perseorangan (Patria dan Arif, 1998). Adapun metode yang digunakan adalah historis dengan melakukan empat tahap penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip/dokumen yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selain itu juga digunakan arsip-arsip yang dimiliki PGRI, yang berupa majalah bulanan, laporan kongres PGRI serta koran-koran sejaman. Tentu saja dalam penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder terutama buku-buku yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Nasional Orde Lama

Ketika Dewan Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 yang diberi tugas untuk menyusun Undang-undang Dasar baru belum juga dapat menyelesaikan tugasnya, Presiden Soekarno mengajukan konsep "Demokrasi Terpimpin", dengan mendekritkan berlakunya kembali Undang-undang Dasar

1945. Dekrit itu kemudian disusul dengan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Ideologi Demokrasi Terpimpin beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Seperti dijelaskan di atas bahwa akhirnya Presiden Soekarno menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan (Gonggong, 2002).

Manipol yang kemudian ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 dengan menambahkan USDEK, bertujuan untuk mengembalikan revolusi Indonesia pada cita-cita revolusi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu segala kebijakan termasuk kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada Manipol-USDEK. Pendidikan yang dilaksanakan adalah pendidikan Manipolis. Pendidikan Manipolis bertujuan melahirkan tenaga-tenaga ahli yang patriotik, demokratis dan manipolis. Sistem pendidikan berwatak manipolis harus menyiapkan manusia baru kader pembangunan yang ahli, patriot, demokrat serta bercita-cita sosialisme. Tujuannya adalah membentuk tenaga ahli dalam pembangunan untuk melahirkan warganegara yang berjiwa Pancasila dan patriot komplit.

Untuk memberikan dasar dalam pendidikan nasional yang sesuai dengan Manipol-USdek Menteri PP dan K, Prof. Dr. Prijono, merumuskan langkah-langkah jangka pendek dengan mengeluarkan instruksi Menteri Muda PP dan K tentang Sapta Usaha Tama dan sistem Pendidikan Pancawardhana. Ada dua alasan yang dikemukakan menteri sehubungan dengan kebijakan itu. *Pertama*, sistem pendidikan Pan-

cawardhana pada hakikatnya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi, serta bercorak nasionalistik yang memenuhi tuntutan Revolusi Indonesia yang sedang berjalan.

Kedua, kebijakan itu menurut Menteri Prijono merupakan penolakannya terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, yang menurutnya hanya cocok untuk pelaksanaan pendidikan pada masa Demokrasi Liberal. Terhadap kedua kebijakan itu, Sistem Pendidikan Pancawardhana dan Sapta Usaha Tama, pada umumnya masyarakat menolak karena sikap politik Menteri PP dan K, Prijono, serta Sekretaris Jenderal PP dan K yang mendukung pendirian Lembaga Pendidikan Nasional (LPN), lembaga yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui Lembaga Pendidikan Nasional, PKI merumuskan Pancacinta yang menurutnya sebagai isi moral sistem pendidikan Pancawardhana, yaitu; (1) Cinta Nusa dan Bangsa, (2) Cinta ilmu pengetahuan, (3) Cinta kerja dan Rakyat yang bekerja, (4) Cinta perdamaian dan persahabatan antar bangsa dan (5) cinta orang tua. Alasan LPN merumuskan "pancacinta" ini adalah karena penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sampai saat itu lebih menekankan pada aspek intelektual. Siswa dididik agar pengetahuan tentang ilmu dan kecakapannya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi pendidikan nasional yang dirumuskan Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965 adalah sebagai alat revolusi untuk membina: (1) Manusia Indonesia Baru yang berjiwa Pancasila-Manipol/Usdek dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut; (2) *Manpower* yang cukup untuk melaksanakan pembangunan; (3)

Kepribadian kebudayaan nasional yang luhur; (4) Ilmu dan teknologi yang tinggi; (5) Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi.

Untuk efektivitas praksis penyelenggaraan pendidikan maka kurikulum sekolah harus memiliki jiwa: (1) Semangat mengemban amanat penderitaan rakyat secara gotong royong demi tercapainya masyarakat adil makmur dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa; (2) Semangat Demokrasi Terpimpin yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat; (3) Semangat cinta bangsa dan tanah air serta semangat kesatuan bangsa yang *ber-bhinneka tunggal ika*, berkepribadian dan berkebudayaan nasional; (4) Rasa perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia atas semangat NEFO untuk membangun dunia baru yang bebas dari imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme; (5) Kepercayaan dan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berkeadaban sebagai karakteristik bangsa Indonesia (Waluyo, 1964).

Dalam situasi yang kacau, pro dan kontra terhadap konsep pendidikan Pancawardhana-Pancacinta itu, Presiden mengeluarkan satu Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 1965 tentang dasar-dasar pendidikan, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional yang ditafsirkan menurut Manipol Usdek. Dalam Penpres itu dinyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara-warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materil dan berjiwa pancasila. Oleh karena politik pendidikan nasional adalah Manifesto Politik Republik Indonesia, maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan Nasional Demokratis harus me-

lahirkan patriot-patriot komplit, yang berdasarkan Pancasila-Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa.

Berdasarkan tujuan, isi moral dan politik pendidikan nasional tersebut, jelas menggambarkan bahwa suasana kependidikan saat itu mengharuskan pemerintah Indonesia dengan segala daya yang dimiliki dikerahkan untuk mensukseskan dalam istilah yang dijelaskan Presiden Soekarno bahwa 'revolusi yang belum selesai'. Konsep revolusi adalah doktrin yang selalu dikumandangkan oleh komunisme. Artinya ideologi komunis telah betul-betul menyusupi segi kehidupan bangsa Indonesia tak terkecuali segi pendidikan. Penpres Nomor 19 tahun 1965 itu belum sempat dilaksanakan karena keadaan politik yang semakin kacau dan friksi antar golongan, antar partai, pemerintah dan Angkatan Darat khususnya semakin tajam hingga timbul Gerakan 30 September (G 30 S).

Penyiapan Guru Manipolis versus Guru Nasionalis

Dalam masa pemerintahan Orde Lama di mana sistem pendidikan Pancawardhana telah diberlakukan, selain syarat-syarat kualifikasi dan kepangkatan, seorang guru harus revolusioner, ahli dalam bidangnya, manipolis dan patriot paripurna. Di antara syarat-syarat itu, maka syarat kerevolusioneran guru adalah nomor satu, sedangkan yang lainnya menduduki nomor dua dan seterusnya. Guru-guru yang patriot-paripurna dan ahli diperlukan sebanyak-banyaknya dalam waktu cepat untuk mengimbangi jumlah guru yang manipolis dan reaksioner agar penerapan pendidikan manipolis segera tercapai.

Watak guru yang revolusioner adalah memiliki rasa kebencian yang tajam dan semangat perlawanan yang gigih terhadap musuh-musuh revolusi yaitu imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme dan feodalisme. Guru juga harus memiliki kesadaran kehidupan demokratis dalam rangka untuk menyatupadukan semua kekuatan nasional yang anti imperialis dan anti feodal. Dengan demikian, harapan pemerintah saat itu, bahwa guru tidak boleh buta politik apalagi takut politik, karena itu akan mudah menjadi umpan politik yang reaksioner, yang tidak membela kepentingan rakyat (Waluyo, 1964). Hal itulah yang merupakan mala petaka awal dimana tugas kependidikan yang harusnya dilakukan guru harus dibarengi tugas politik. Tugas guru pada masa Orde Lama adalah sebagai berikut.

Menanamkan cita-cita sosialisme yaitu kebencian kepada segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, meskipun pada tahap awal baru melawan imperialisme dan feodalisme; (2) Memiliki kecintaan pada ilmu dan kebenaran serta ilmu dan keterampilan teknis yang tinggi; (3) Suka bekerja baik pekerjaan kasar maupun halus; (4) Memiliki rasa seni yang tinggi dengan isi yang revolusioner dan artistik; (5) Sehat jasmani agar mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik (Waluyo, 1964).

Selain persyaratan tersebut, guru juga harus memiliki keahlian dan kecakapan yang mencakup dua hal (1) Menguasai mata pelajaran yang akan dipegangnya, yang akan diajarkannya sesuai dengan tingkat dan jenisnya serta mata pelajaran lain yang relevan; (2) Menguasai ilmu dan teknik mendidik atau ilmu keguruan yang terdiri dari ilmu jiwa, ilmu pendidikan dan ilmu mengajar (*Pendidikan Nasional*, 1963).

Kinerja Guru di Tengah Kemelut Nasional

Kesulitan ekonomi yang dialami para guru pada saat itu, telah dimanfaatkan oleh PKI melalui organisasi guru, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dengan melakukan infiltrasi baik melalui organisasi maupun massa guru. Apa yang telah dilakukan PKI itu telah berhasil menimbulkan konflik internal PGRI. Penyusupan yang telah dilakukan oleh PKI berhasil menggandeng 573 orang guru SD dari Jawa Barat serta Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 2.000 orang guru. Bahkan konflik internal dalam tubuh organisasi PGRI itu menjadi benar-benar nyata setelah pengurus PGRI mengikuti Musyawarah Penegasan Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional yang berlangsung di Jakarta tanggal 17 Juli 1963 (Sejarah PGRI, t.t.).

Musyawarah yang diadakan oleh partai-partai politik dan ormasnya merupakan reaksi terhadap "Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol" yang diadakan pada bulan Februari 1963 oleh Lembaga Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan PKI.

Lembaga Pendidikan Nasional (LPN) yang mendukung Sistem Pendidikan Pancawardhana berpendapat bahwa politik pendidikan harus mempunyai 3 prinsip; yaitu Nasional, Kerakyatan dan Ilmiah. (*Pendidikan Nasional*, 1963). Kedua sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Pancawardhana, itu telah menimbulkan pertentangan masyarakat, bahkan dikalangan pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Golongan komunis mempertahankan sistem pendidikan Pancawardhana, sedangkan golongan agama dan nasionalis menentang sistem itu karena dianggap telah menghilangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertentangan antara kubu Pancawardhana - Pancacinta di satu pihak dengan kubu pendidikan berdasarkan Pancasila telah mempengaruhi kehidupan guru (Poerbakawatja, 1963).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tugas guru adalah melakukan indoktrinasi kepada anak didik melalui Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran wajib. Kewajiban untuk mengajarkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran wajib di sekolah hingga perguruan tinggi juga sesuai dengan Ketetapan MPRS II Tahun 1960 Bab II pasal 2 ayat (2) dan seruan Presiden Soekarno untuk mengajarkan guru-guru agar mau berpolitik. Guru Indonesia harus mengenal politik dan mengamalkan garis politik yang berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek secara konsekuen dan berani untuk membentuk anak-anak didik Indonesia berjiwa patriot paripurna yang manipolis dan ahli (Caropeboka, 1965).

Kepada guru-guru, PGRI *Non-Vaksentral* menyerukan untuk melakukan pemogokan, demonstrasi dan konfrontasi sebagaimana yang dilakukan para buruh kepada majikannya. Anti pemogokan berarti anti buruh, anti buruh berarti anti komunis, dan anti komunis berarti anti Nasakom. Mereka yang anti Nasakom artinya anti revolusioner (kontrarevolusi). Demikian propaganda yang dikumandangkan guru-guru yang pro komunis dalam mengintimidasi guru-guru lainnya yang masih setia pada Pendidikan Pancasila dan PGRI *Vak Sentral*. Para guru dan masyarakat umumnya dipaksa untuk menarik garis tegas tentang siapa kawan dan siapa lawan. Prinsip "siapa kawan dan siapa lawan" berlaku juga dalam tubuh PGRI. Kawan adalah semua golongan Pancasilais anti PKI yang dalam pendidikan berusaha mengamankan Pancasila, dan lawan adalah PKI yang berusaha memaksakan sistem pendi-

dikan Panca Cinta dan Panca Tinggi. Persaingan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat pun terjadi dengan cara yang berlebihan. Orang-orang yang berbeda pendapat dengan pandangan pemerintah, dengan mudah dituduh kontra revolusi, anti Manipol, agen subversi asing dan lain-lain julukan lagi yang mematikan. (Suradi, 1986, Beeby, 1981)

Selain itu dalam sebuah seminar yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Nasional tanggal 26 - 28 Juli 1964 di Jakarta disepakati untuk mendukung sepenuhnya aksi boikot film imperialis Amerika Serikat, karena film itu dianggap membahayakan pendidikan dan pertumbuhan anak didik. Aksi boikot yang dipelopori oleh para peserta seminar dan pekerja film yang patriotik itu juga menjadi kewajiban kolektif guru dalam mewujudkan kebudayaan nasional yang meliputi seluruh bidang kehidupan rohaniah dan jasmaniah bangsa Indonesia. Aksi lain yang dilakukan guru adalah menuntut perbaikan nasib. Aksi yang dilakukan guru itu akhirnya membuahkan hasil mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 500,- per bulan dan baju seragam 1 stel per tahun (Depdikbud, 1990).

Satu kelemahan yang disadari atau tidak oleh pemerintah, bahwa sistem pendidikan nasional yang resmi yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai pelaksana Pendidikan Pancasila dalam sistem Pancawardhana, ternyata mengundang peluang untuk dapat disusupi unsur lain yang membahayakan Pancasila, seperti yang telah dimanfaatkan oleh PKI dengan Pancacinta dan Panca Tingginya. Ketika usaha besar-besaran yang dilakukan PKI dengan mencoba menggagalkan Kongres PGRI di Surabaya (1959) dan Jakarta tahun 1962, mereka lupa kalau dalam organisasi PGRI masih terdapat banyak guru-guru yang setia pada prinsip, dasar,

tujuan murni PGRI sebagai organisasi yang menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

SIMPULAN

Kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak mungkin lepas dari kebijakan politik. Demikian pula saat politik menjadi "panglima" pada era Orde Lama, pendidikan harus berwatak manipolis. Dalam pendidikan manipolis, seorang guru harus revolusioner, ahli dalam bidangnya, manipolis dan patriot paripurna. Di antara syarat-syarat itu, maka syarat ke-revolusioneran guru adalah nomor satu, sedangkan yang lainnya menduduki nomor dua dan seterusnya. Watak guru yang revolusioner adalah memiliki rasa kebencian terhadap imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme dan feodalisme. Hal itu dapat dipahami karena situasi politik Indonesia pada masa Orde Lama yang "dipaksa" mendukung manipol. Bahkan PKI memiliki peran besar dalam mengintervensi dalam pembinaan guru-guru, terutama guru sekolah dasar. Oleh karena itu dalam situasi yang demikian, kinerja guru lebih diarahkan pada melakukan indoktrinasi kepada peserta didik bagaimana praksis pendidikan manipolis dan Pancawardhais ketimbang pada pendidikan berpikir. Tentu saja cara-cara demikian sangat ditentang oleh golongan nasionalis yang menginginkan pendidikan Pancasila. Keberadaan dua kubu itulah yang menyebabkan guru-guru sekolah dasar pun dalam kinerjanya terpecah menjadi dua, yang nasionalis dan yang dekat dengan PKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Institute for Teaching and School Leadership. 2011. *National Professional Standards for Teachers*. Melbourne: AITSL.
- Beeby, C.E. 1981. *Pendidikan di Indonesia* Terjemahan. Jakarta : LP3ES.
- Caropeboka, Chairun. 1965 "Sesuaikan Pengajaran Sekolah Dasar Dewasa Ini dengan Kebutuhan Kaum Tani". *Pendidikan Nasional*, edisi 1965
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1985. *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 1990. *Lima Repelita Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud.
- Gonggong, Anhar. 2002. *Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan: Pergumulan Antara Masyarakat Warisan Dengan Masyarakat Merdeka-Ciptaan*. Yogyakarta: Komunitas Ombak.
- Hasil Kongres PGRI ke-13, tanggal 21 - 25 Nopember 1973.
- Keputusan Presiden Republik Inonesia Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional.
- Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1954 tentang *Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran*.
- Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1965 tentang *Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Pancasila*
- Pendidikan Nasional*. 1963. "Pantjacinta sebagai Sumbanagn Bagi Pelaksanaan Pancawardhana secara Konsekwen". No. 7 - 8 Maret 1963.
- Pendidikan Nasional*. 1964. "Guru yang Manipolis". Edisi 1964.
- Patria, Nezar & A. Arief. 1999. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila*
- Poerbakawatja, Soegarda. 1963. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta : Gunung Agung.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto (Ed). 2008. *Sejarah Na-*

- sional Indonesia VI*. Edisi V. Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta: Serambi.
- Sejarah PGRI*. t.t. Surabaya: YPLP PGRI DT I Jawa Timut.
- Suara Guru* Nomor 2 Tahun 1973
- Suradi H.P. 1986. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Tahun 1945-1965*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Purbakala.
- Syamsudin, Helius dkk. 1993. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Ke-*
- Ketika Kebijakan Orde Lama ... – Umasih merdekaan 1945 – 1966*. Jakarta: Proyek ISDN.
- Waluyo, Shopiaan. 1964. "Sistem Pendidikan Guru dalam Alam Manipol". *Prasaran* disampaikan dalam Seminar Pendidikan Guru tanggal 26-28 Juli 1964.
- Yasin, Anwar. 1987. *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka.